

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Riri Septyaningrum Putri, Deki Fermansyah, Any Eliza, Suharto
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: rifadaras@gmail.com, dekifermansyah@radenintan.ac.id, anyeliza@radenintan.ac.id

Abstract: *This study aims to determine financial performance based on the ratio approach of effectiveness, independence, and fiscal decentralization in the city of Bandar Lampung. This study uses a qualitative descriptive approach. The data used in this study are secondary data taken through BPKAD Bandar Lampung for the fiscal year 2008-2017. The results of this study indicate that the ratio of regional financial effectiveness on average is at 90.49% with the effective category and the trend of regional financial effectiveness at 70.814%; The ratio of regional financial independence average is at 27.96% which is categorized as low and the trend of regional financial independence is at 262.42%; while the regional financial fiscal decentralization ratio on average was at 17.85% with the unfavorable category and the regional financial fiscal decentralization trend was at 197.23%.*

Keywords: *Regional Finance, Ratio of Effectiveness, Ratio of Independence, Ratio of Decentralization.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan pendekatan rasio efektivitas, kemandirian dan desentralisasi fiskal di kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil melalui BPKAD kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada 90,49% dengan kategori efektif dan trend efektivitas keuangan daerah berada pada 70,814%; Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 27,96% dikategorikan rendah dan trend kemandirian keuangan daerah berada pada 262,42%; sedangkan padarasio desentralisasi fiskal keuangan daerah secara rata-rata berada pada 17,85% dengan kategori kurang baik dan trend desentralisasi fiskal keuangan daerah berada pada 197,23%.*

Kata Kunci: *Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi.*

A. PENDAHULUAN

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.¹ Untuk melaksanakan tugas sebagai suatu organisasi yang memiliki harta kekayaan yang bersumber dari penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai segala proses pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan, hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.² Menurut UU nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak untuk wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

¹DJPK Kemenkeu, "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pajak Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah," Lihat: [Www.djpk.kemenkeu.Go.Id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).

²Munawir Sazali, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020), hlm. 88–107.

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Adapun misi utama UU nomor 33 tahun 2004 adalah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan.⁴

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.22 tahun 1999, tentang pelaksanaan otonomi daerah, maka terjadi perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan UU yang berlaku.⁵ Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.⁶

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan peraturan daerah⁷. Berdasarkan penerapan otonomi daerah maka pemerintah daerah yang menentukan Anggaran tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah serta arah pembangunan daerah tersebut. Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal.⁸

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintah daerah adalah dari segi faktor keuangan. Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota di Provinsi Lampung dan salah satu kota yang memiliki pendapatan yang selalu meningkat dibandingkan kota atau kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung menduduki posisi pertama di Provinsi Lampung sebagai kota yang mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar dibandingkan kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Lampung.

Alasannya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung selalu diikuti dengan jumlah dana berimbang yang selalu meningkat. Daerah otonom harus seminimal mungkin ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Berikut ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikota/kabupaten di Provinsi Lampung:

³I Bisma, Dewa Gde, and Hery Susanto, "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007," *Ganec Swara* 4, no. 3 (2010), hlm. 75-86.

⁴*Ibid.*

⁵Joko Pramono, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)," *Among Makarti* 7, no. 1 (2014).

⁶Aswarodi, "Analisis Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Undang -Undang No. 25 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan," in *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004).

⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang," *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (2004).

⁸Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 41.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2008-2016

(Dalam Miliar Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Tahun								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bandar Lampung	67.661	70.432	86.692	162.818	298.696	360.968	394.646	397.547	483.379
Metro	19.980	21.060	27.345	42.002	48.377	59.224	97.307	127.586	113.989
Lampung Barat	17.198	11.579	16.302	21.562	25.278	33.829	40.800	46.434	49.078
Tanggamus	15.314	-	11.663	26.258	18.672	22.017	22.488	21.979	23.712
Lampung Selatan	25.572	25.030	40.749	68.652	80.459	100.050	130.597	161.645	184.063
Lampung Timur	26.645	18.821	20.669	31.844	49.824	40.761	83.131	84.496	94.924
Lampung Tengah	22.837	24.471	37.086	50.591	101.060	81.780	108.180	116.343	137.871
Lampung Utara	16.531	11.794	13.499	28.762	21.351	46.626	80.918	93.239	98.607
Way Kanan	14.476	11.481	8.745	9.472	10.148	24.831	45.811	47.882	44.346
Tulang Bawang	10.437	11.396	44.498	19.980	23.152	36.242	24.444	34.008	26.416
Pesawaran	2.825	4.542	13.229	178.916	25.710	25.933	36.482	37.060	41.956
Pringsewu	-	-	5.809	19.347	29.090	30.421	63.339	61.765	68.157
Mesuji	-	-	1.398	5.392	8.269	10.021	20.901	18.713	27.783
Tulang Bawang Barat	-	-	2.214	4.298	5.840	10.345	15.436	16.452	20.882
Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	10.373	11.597	20.710

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018.⁹

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung selalu diikuti dengan jumlah Dana Perimbangan yang selalu meningkat. Dana berimbang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah.¹⁰ Berikut ini adalah dana Berimbang kota Bandar Lampung:

Tabel 2. Dana Berimbang Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017

Tahun	PAD	Dana Berimbang	Lain-lain PAD yang sah
2008	67.661.519.021,92	634.760.315.000,46	7.896.232.000,43
2009	70.432.26.0003,19	659.733.381.000,20	4.460.818.000,96
2010	86.692.399.700,41	672.078.484.000,49	4.704.103.000,83
2011	162.818.119.556,88	747.009.425.171,00	6.198.579.220,88
2012	298.696.062.085,49	901.841.182.094,00	40.144.717.721,23
2013	360.698.350.131,88	992.894.943.895,00	59.158.057.632,84
2014	394.646.889.446,59	1.039.433.426.630,00	89.351.963.991,40
2015	397.547.326.856,39	1.016.422.749.268,00	81.159.929.433,12
2016	483.379.398.034,84	1.376.175.794.387,00	98.172.277.364,71
2017	612.809.680.623,87	1.456.610.360.061,45	197.725.452.250,52

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2008-2017.¹¹

⁹Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 2008-2016*, (2018).

¹⁰Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 174.

¹¹BPKAD, *Laporan Keuangan Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017*, (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017 hlm. 86.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa dana berimbang pada tahun 2008-2017 Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan. Dilihat besarnya dana berimbang dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat ketergantungan fiskal pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2008-2017.

Besarnya dana berimbang dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat ketergantungan fiskal pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2008-2017. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Halim dalam Reza Marizka bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.¹² Tingkat kemandirian, efektivitas, dan desentralisasi keuangan daerah pemerintah/kota dalam pengelolaan dana yang diperoleh tersebut dapat mencerminkan kinerja pemerintahannya.

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategik planning. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu maupun kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.¹³

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukanlah analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja Pemerintahan Daerah yaitu analisis rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill. Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Dori (2014) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan masih tergantung pada adanya bantuan dari pusat.¹⁵ Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian Andry (2014) menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah kota Medan menunjukan penurunan pada trend rasio efektivitas, namun desentralisasi menunjukan kemampuan yang cukup baik.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan yang dilihat berdasarkan rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal di Kota Bandar Lampung.

¹²Reza Marizka, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006-2011* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2014), hlm. 3.

¹³Paramitha Sandy Mokodompit, Sifrid S Pangemanan, and Inggriani Elim, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 2 (2014).

¹⁴Andri Haryanto, *Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hlm. 22.

¹⁵Dori Saputra, *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2014).

¹⁶Haryanto, *Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis kemampuan daerah serta kinerja keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung yang diukur melalui analisis rasio yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi fiskal.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data APBD tahun 2008-2017 yang didapatkan dari BPKAD kota Bandar Lampung tahun anggaran 2008-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sampel dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam 10 tahun dari tahun 2008-2017.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan ada tiga yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal.

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.¹⁷ Berikut merupakan perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah:¹⁸

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Persentase (%)
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90-100
Cukup Efektif	> 80-90
Kurang Efektif	> 60-80

Sumber : Depdagri, Kepmendagri tahun 2002.¹⁹

Selanjutnya Trend efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal. Analisis trend efektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila persentase trend EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase trend EKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan efektivitas keuangan daerah di Kota Bandar Lampung. Sebaliknya, bila

¹⁷Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

¹⁸Saputra, “Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat, *Jurnal Akuntansi*, 2014”

¹⁹Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor, “Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan,” *Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah* (29AD).

persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan efektivitas keuangan Perhitungan trend efektivitas keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, tahun 2008 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan EKD pada tahun berikutnya (Tahun 2009 sampai dengan 2017). Dengan demikian, trend yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan yang terjadi dengan diimplementasikannya reformasi otonomi dan keuangan daerah.

$$Trend\ EKD = \frac{EKD\ Tahun\ Pembanding}{EKD\ Tahun\ Dasar} \times 100$$

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah²⁰, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Trend\ EKD = \frac{EKD\ Tahun\ Pembanding}{EKD\ Tahun\ Dasar} \times 100$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.²¹ Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4. Pola Hubungan dan Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan / Ketergantungan Keuangan Daerah	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Depdagri, *Kepmendagri No. 29 tahun 2002*.²²

Selanjutnya Kecenderungan kemandirian keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal. Analisis trend kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah

²⁰Maisyuri Maisyuri, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Visioner & Strategis* 6, no. 1 (2017).

²¹Ikhwan Ratna, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Strategi Pembangunan Kota Di Era Otonomi Daerah Pada Kota Pekanbaru,” *Jurnal El-Riyasah* 3, no. 1 (2012), hlm. 1–10.

²²Nomor, “Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan.”

perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. Apabila persentase trend KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase trend KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian keuangan di Kota Bandar Lampung semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan kabupaten/kota.

Dalam penelitian ini, tahun 2008 merupakan tahun dasar yang akan digunakan sebagai tahun dasar untuk melihat arah perkembangan KKD pada tahun berikutnya (tahun 2009 sampai dengan 2017). Dengan demikian, trend yang diperoleh nanti dapat diinterpretasikan sebagai arah perkembangan Perhitungan trend kemandirian keuangan daerah yang terjadi dengan diimplementasikannya reformasi otonomi dan keuangan daerah. Dari penjelasan ini maka trend kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD Tahun Pembanding}}{\text{KKD Tahun Dasar}} \times 100$$

Rasio desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Perhitungan desentralisasi fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tabel 5. Tingkat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah	Desentralisasi %
Sangat kurang	0,00-10,0%
Kurang	10,01-20,00%
Sedang	20,01-30,00%
Cukup	30,01-40,00%
Baik	40,01-50,00%

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 29 tahun 2002.²³

Selanjutnya analisis trend desentralisasi keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan. Semakin besar persentase trend desentralisasi dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemampuan pemerintah/kota dalam menggali potensi daerahnya semakin baik dan sebaliknya.²⁴ Perhitungan trend desentralisasi fiskal:

$$\text{Trend DKD} = \frac{\text{DKD Tahun Pembanding}}{\text{DKD Tahun Dasar}} \times 100$$

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh diharapkan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan daerah khususnya di Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 berdasarkan 3 rasio

²³Ibid.

²⁴Haryanto, *Analisis Efektivitas, Kemandirian, Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014), hlm. 23.

yaitu rasio efektivitas, rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal. Dengan analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah, mengukur efektivitas keuangan daerah, dalam merealisasikan pendapatan asli daerah, dan dapat mengukur masing masing sumber pendapatan dalam membentuk pendapatan daerah.

1. Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 dapat dilihat pada Tabel 6 :

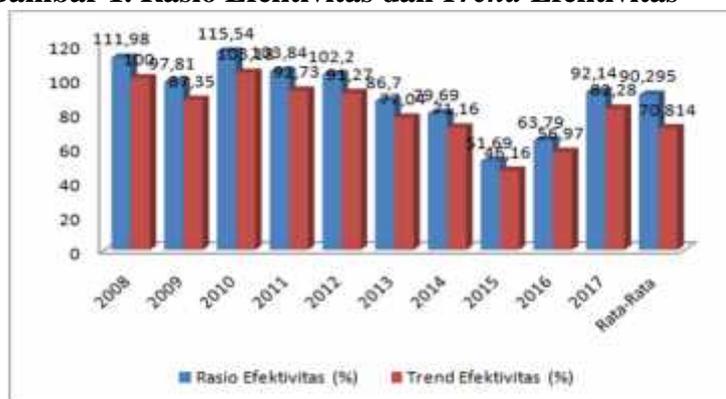
Tabel 6. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Trend Efektivitas (%)
2008	60.422.775.028,70	67.661.519.021,92	111,98	100
2009	72.009.309.841,70	70.432.260.003,19	97,81	87,35
2010	75.031.991.782,16	86.692.399.700,41	115,54	103,18
2011	156.796.491.183,50	162.818.119.556,88	103,84	92,73
2012	292.272.049.972,25	298.696.062.085,49	102,20	91,27
2013	418.111.740.815,52	360.698.350.131,88	86,27	77,04
2014	495.200.463.391,26	394.646.889.446,59	79,69	71,16
2015	769.108.142.606,24	397.547.326.856,39	51,69	46,16
2016	757.745.187.987,05	483.379.398.034,84	63,79	56,97
2017	994.795.696.600,00	612.809.680.623,87	92,14	82,28
Rata-rata	409.149.384.920,84	293.538.200.546,15	90,495	70,814

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6 tersebut pada tahun 2010 merupakan yang tertinggi selama tahun 2008-2017 karena rasio efektivitas keuangan daerah yang dicapai melebihi 100 persen atau sebesar 115,54 persen sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana lebih dari 100 persen merupakan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah di anggarkan tidak efektif dan merupakan yang terendah selama tahun 2008-2017 karena rasio efektivitas keuangan daerah kurang dari 60 persen atau sebesar 51,69 persen. Dari tabel 6 di atas dapat dibuat gambar efektivitas keuangan daerah sebagaimana dilihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1. Rasio Efektivitas dan Trend Efektivitas



Sumber: Data diolah, 2018

Dilihat dari data di atas menggambarkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah mengalami peningkatan dan penurunan. Secara rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2008-2017 merupakan kriteria efektif dengan persentase sebesar 90,495 persen sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana 90-100 persen dalam kriteria efektif. Kemudian untuk melihat perkembangan efektivitas keuangan daerah tahun 2008-2017 diukur menggunakan trend dengan tahun 2008 sebagai tahun dasar.

Trend efektivitas keuangan daerah tahun 2008-2017 mengalami banyak penurunan dengan rata-rata trend efektivitas sebesar 70,81 persen. tahun 2010 merupakan persentase tertinggi karena trend efektivitas keuangan daerah mencapai lebih dari 100 persen atau sebesar 103,18 persen. Dan pada tahun 2015 merupakan persentase terendah sebesar 46,16 persen menunjukkan perkembangan efektivitas keuangan daerah yang menurun atau kurang baik.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah berupaya menerapkan potensi yang sebenarnya tetapi masih banyak kendala sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan seperti dalam hal pemungutan pajaknya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung yaitu kemampuan sumber daya manusia yang masih kurang, sarana prasarana yang belum maksimal, tingkat kesadaran dari wajib pajak masih sangat kurang, masih kurang maksimalnya sanksi bagi wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak dalam bentuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang 28 dan dilihat dari kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung, daya beli masyarakatnya juga ikut mempengaruhi. Jika daya beli masyarakat naik pendapatan restoran hotel atau bisnis lainnya akan ikut naik sehingga mereka bisa membayar pajaknya.

2. Analisis Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Trend Kemandirian (%)
2008	67.661.519.021,92	634.760.315.000,46	10,66	100
2009	70.432.260.003,19	659.733.381.000,20	10,68	100,19
2010	86.692.399.700,41	672.078.484.000,49	12,90	121,01
2011	162.818.119.556,88	747.009.425.171,00	21,80	204,50
2012	298.696.062.085,49	901.841.182.094,00	33,12	310,69
2013	360.698.350.131,88	992.894.943.895,00	36,23	340,81
2014	394.646.889.446,59	1.039.433.426.630,00	37,97	356,19
2015	397.547.326.856,39	1.016.422.749.268,00	39,11	366,89
2016	483.379.398.034,84	1.376.175.794.387,00	35,12	329,36
2017	612.809.680.623,87	1.456.610.360.061,45	42,07	394,65
Rata-Rata	293.538.200.546,15	949.696.006.150,76	27,966	262,429

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 7 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2008-2017 menunjukkan persentase tingkat kemandirian yang terus meningkat kecuali pada tahun 2016 mengalami

penurunan. Rasio kemandirian tertinggi yaitu pada tahun 2017 dikategorikan masih rendah dengan persentase sebesar 42,07 persen sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana 25-50 persen merupakan kriteria rendah. Sedangkan tingkat kemandirian terendah yaitu pada tahun 2008 sebesar 10,66 persen menurut kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah 0-25 persen merupakan kriteria tingkat kemandirian sangat rendah. Dari tabel di atas dapat dibuat gambar rasio tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

Gambar 2. Rasio Kemandirian dan *Trend* Kemandirian



Sumber: Data diolah, 2018

Dari data di atas terlihat rata-rata kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 sebesar 27,966 persen dikategorikan rendah sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana 25-50 persen merupakan kriteria rendah.

Berdasarkan tabel 7 bahwa pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung semakin meningkat setiap tahunnya tetapi diikuti dengan dana berimbang atau transferan dari pemerintah pusat yang semakin meningkat juga setiap tahunnya sehingga Kota Bandar Lampung masih belum mandiri untuk membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahannya.

Selain itu dapat diartikan bahwa tidak ada peningkatan secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, seperti dalam hal pembayaran pajak dan retribusi. Besarnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sebenarnya menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Namun jika dilihat dari pajak dan retribusi daerah yang masih rendah dan dana berimbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan pemerintah Kota Bandar Lampung kurang yakin dapat menggali potensi daerahnya sehingga pendapatan asli daerah yang di anggarkan masih rendah.

3. Analisis Rasio Desentralisasi

Rasio Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

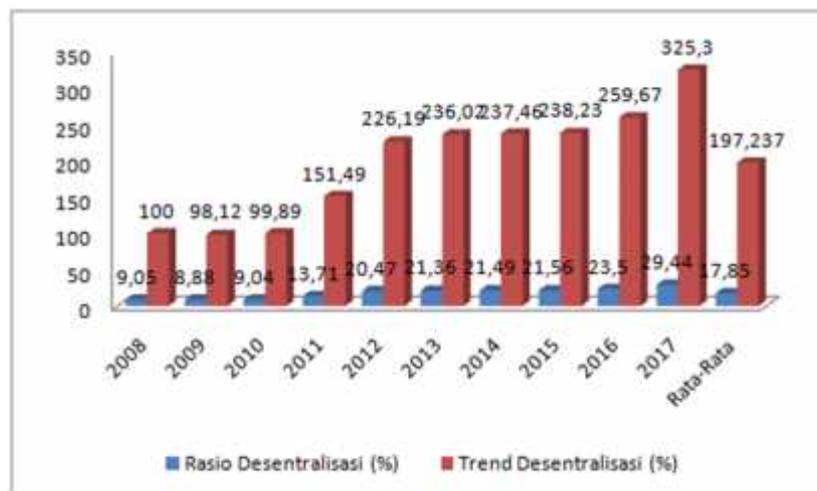
Tabel 8. Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Trend Desentralisasi Fiskal(%)
2008	67.661.519.021,92	747.982.275.000,50	9,05	100
2009	70.432.260.003,19	793.493.023.000,29	8,88	98,12
2010	86.692.399.700,41	959.069.382.000,31	9,04	99,89
2011	162.818.119.556,88	1.187.871.504.156,20	13,71	151,49
2012	298.696.062.085,49	1.459.471.856.318,18	20,47	226,19
2013	360.698.350.131,88	1.688.412.290.739,88	21,36	236,02
2014	394.646.889.446,59	1.836.004.647.114,59	21,49	237,46
2015	397.547.326.856,39	1.843.540.674.593,39	21,56	238,23
2016	483.379.398.034,84	2.057.086.652.010,39	23,50	259,67
2017	612.809.680.623,87	2.081.420.040.685,32	29,44	325,30

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 8 tersebut diketahui bahwa rasio desentralisasi fiskal Kota Bandar Lampung tertinggi pada tahun 2017 dengan tingkat persentase mencapai 29,44 persen. Bila dilihat berdasarkan kriteria desentralisasi fiskal, pada tahun 2017 berada pada persentase diatas 25 persen dikategorikan sedang. Sedangkan tahun 2009 merupakan persentase desentralisasi fiskal terendah dengan persentase sebesar 8,88 dikategorikan sangat kurang. Dari tabel di atas dapat dibuat gambar rasio tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

Gambar 3. Rasio Desentralisasi dan Trend Desentralisasi



Sumber: Data diolah, 2018

Secara rata-rata kemampuan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat masih kurang baik dengan persentase sebesar 17,85 persen. Sebagaimana berdasarkan kriteria desentralisasi fiskal keuangan daerah dimana dibawah 20,00 persen merupakan kriteria kurang baik.

Kurangnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan maka kurang juga kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal. Jumlah pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2008-2017 memang terus mengalami peningkatan, akan tetapi kontribusi dana berimbang atau dana transferan dari

pemerintah pusat juga mengalami peningkatan sehingga kembali mendominasi penerimaan pendapatan daerah. Yang artinya tingkat ketergantungan pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Kinerja Kota Bandar Lampung belum maksimal walaupun setiap tahunnya Kota Bandar Lampung mencoba untuk menjadi lebih baik dalam pengelolaannya dan memperbaiki masalah-masalah diberbagai sektor seperti bagaimana memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, memaksimalkan pengelolaan belanja daerah sehingga semua bisa terpanter karena Kota Bandar Lampung mengarah ke otonomi daerah. Dilihat dari trend desentralisasi fiskal keuangan daerah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2008-2017 menunjukkan perkembangan yang semakin baik dengan persentase sebesar 197,237 persen dengan tahun dasar yaitu tahun 2008 sebesar 100 persen.

D. KESIMPULAN

Rasio efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung selama tahun 2008-2017, pada tahun 2008, 2010, 2011, dan 2012 mampu mencapai persentase diatas 100 persen dengan kategori sangat efektif sedangkan 6 tahun lainnya belum mencapai persentase 100 persen. Hal ini dikarenakan belum tercapainya pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Secara rata-rata efektivitas keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 sudah efektif dengan persentase 90,495 persen dikategorikan efektif berdasarkan kriteria kemampuan efektivitas keuangan daerah. Jika dilihat berdasarkan trend rasio efektivitas mengalami kenaikan dan penurunan selama periode tahun 2008-2017 dengan rata-rata 70,814 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mengalami perkembangan karena rata-rata trend efektivitas keuangan daerah tidak mencapai 100 persen.

Rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2008-2017 mengalami kenaikan secara terus-menerus namun belum menunjukkan kemandirian yang semakin baik karena masih dalam kategori rendah dengan rata-rata sebesar 27,966 persen dikategorikan rendah karena nilai tersebut berada diantara 25-50 persen maka Kota Bandar Lampung dianggap masih sangat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi, hal ini terlihat dari trend kemandirian yang mengalami perkembangan selama periode tahun 2008-2018 karena rata-rata trend kemandirian keuangan daerah mencapai 100 persen dengan persentase sebesar 262,429 persen.

Rasio desentralisasi keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2008-2017 cenderung mengalami peningkatan. secara rata-rata menunjukkan kemampuan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat masih kurang baik yaitu sebesar 17,85 persen dikategorikan kurang berdasarkan kriteria desentralisasi keuangan daerah. Trend desentralisasi pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata trend 197,237 persen yang artinya pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami perkembangan dalam menjalankan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat karena rata-rata trend desentralisasi keuangan daerah mencapai 100 persen.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan khususnya kementerian keuangan dan pemerintah daerah. Dimana hasil penelitian bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan terkait keuangan daerah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Aswarodi. "Analisis Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebelum Dan Setelah Pemberlakuan Undang -Undang No. 25 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan." In *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung 2008-2016*, 2018.
- Bisma, I Dewa Gde, and Susanto. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007." *Jurnal Ganec Swara* 4, no. 3 (2010).
- BPKAD. *Laporan Keuangan Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2017*. Bandar Lampung, n.d.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Haryanto, Andri. *Analisis Efektivitas, Kemandirian Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang." *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (2004).
- Kemenkeu, DJPK. "Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pajak Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah." *Lihat: Wwww.Djpk.Kemenkeu.Go.Id*.
- Maisyuri, Maisyuri. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe." *Jurnal Visioner & Strategis* 6, no. 1 (2017).
- Marizka, Reza. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006–2011)." *Jurnal Akuntansi* 1, no. 3 (2013).
- Mokodompit, Paramitha Sandy, Sifrid S Pangemanan, and Inggriani Elim. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2, no. 2 (2014).
- Nomor, Keputusan Menteri Dalam Negeri. "Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan." *Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah* (29AD).
- Pramono, Joko. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)." *Among Makarti* 7, no. 1 (2014).
- Ratna, Ikhwan. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Strategi Pembangunan Kota Di Era Otonomi Daerah Pada Kota Pekanbaru." *Jurnal El-Riyasah* 3, no. 1 (2012).
- Saputra, Dori. *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Padang: Universitas Negeri Padang, 2014.
- Sazali, Munawir. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017)." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020).